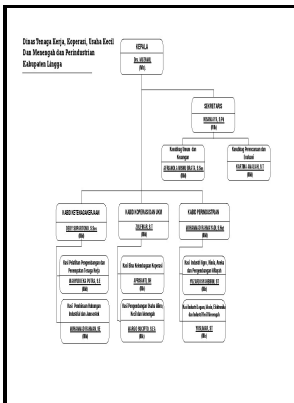


Kumpulan peraturan perundang-undangan kelembagaan koperasi.

Medya Duta - Pengaturan atas peraturan menteri koperasi dan usaha kecil menengah no. 10/per/m.kukm/ix/2015 tentang kelembagaan koperasi terhadap pembuatan akta pendirian koperasi oleh notaris



Description: Collection of law, regulations, and ministerial decisions regarding cooperative societies in Indonesia.

-Kumpulan peraturan perundang-undangan kelembagaan koperasi.

-Kumpulan peraturan perundang-undangan kelembagaan koperasi.

Notes: Includes the text of: Undang-Undang Tentang Perkoperasian.

This edition was published in 2005



Filesize: 41.106 MB

Tags: #Bidang #Kelembagaan #Koperasi

Kumpulan Peraturan Koperasi, KSP, KJK

Bidang Kelembagaan Koperasi memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut : A. Pada pelaksanaan pemeriksaan tersebut sebagai petugas yang hadir Kasi Pengawasan Sutrisno Purwoto, S. Masters thesis, Universitas Pelita Harapan.

Bidang Kelembagaan Koperasi

Pada pemeriksaan kelembagaan Koperasi tersebut disampaikan pertanyaan-pertanyaan tentang legalitas Koperasi, yang diantaranya: Badan Hukum Koperasi, Izin usaha, tentang Anggaran Dasar, termasuk apa saja yang tertera di dalam Anggaran Dasar, sampai dengan apakah pengangkatan Pengurus dan Pengawas tertera daaalam Berita Acara Rapat Anggota.

Peraturan Perundang

IP dan Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan PPKL Suwastri Asih, SE , dan ditanggapi oleh Ketua Sri Subarnilah , Sekretaris Kasiyanti dan Pengawas Gandjar Lestari.

Pengaturan atas peraturan menteri koperasi dan usaha kecil menengah no. 10/per/m.kukm/ix/2015 tentang kelembagaan koperasi terhadap pembuatan akta pendirian koperasi oleh notaris

Namun MK mempunyai alasan yang kuat kenapa UU ini dibatalkan.

Peraturan Undang

The authorization of the legal entity legalization that was initially delegated by the Minister of Cooperatives together with Small -Medium

Enterprises to the Regional Government as the assistant of the Co-Administration is now back to the Central Government.

DEPUTI BIDANG KELEMBAGAAN KOPERASI DAN UKM

Dalam rangka itulah maka di samping koperasi sendiri harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan usaha simpan pinjam tersebut, Pemerintah juga perlu melakukan pembinaan dan pengawasan melalui Menteri yang membidangi koperasi.

Penataan Kelembagaan Pengujian Norma Hukum di Indonesia

Sudah tahukah Anda, di Indonesia? Lihat diakses pada 14 Februari 2016. Kewenangan pengesahan badan hukum koperasi yang awalnya didelegasikan oleh Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah kepada Pemerintah Daerah sebagai pelaksana tugas pembantuan, kini kembali ke tangan Pemerintah Pusat.

Related Books

- [Histoire de la caricature sous la réforme et la ligue--Louis XIII à Louis XVI--](#)
- [Questions de femmes](#)
- [Increase of the duty on certain paper and paperboard](#)
- [Ecological approaches to health - interactions between humans and their environment](#)
- [Libro de dones y de encantamientos](#)